

**ANALISIS PROSEDUR PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN TRANS MUSI PADA PT. SARANA
PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : ANITA KUSUMAWATI

NIM : 22 2009 231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

TAHUN 2013

**ANALISIS PROSEDUR PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN TRANS MUSI PADA PT. SARANA
PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : ANITA KUSUMAWATI

NIM : 22 2009 231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

TAHUN 2013

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Kusumawati

Nim : 22 2009 231

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2013

Penulis



Anita Kusumawati

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis prosedur pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Nama : Anita Kusumawati

Nim : 22 2009 231

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal

2013

Pembimbing



(Lis Djuniar, S.E., Msi)

NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)

NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO :

- ❖ *Lakukan sesuatu yang baru, kejar mimpi - mimpi yang belum tercapai*
- ❖ *Jangan hanya ada niat, paksakan buat mengejar cita -cita dan apa yang ingin dicapai jangan diperbudak oleh si Pemalas*
- ❖ *Jangan menunggu sesuatu yang membuat kita menjadi penghalang atau memperlambat kita mencapai kesuksesan*
- ❖ *Harus lebih maju dari orang di sekitar kita*

(Anita)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ *Saudara - saudaraku*
- ❖ *Seseorang yang menjadi imamku kelak*
- ❖ *Pembimbing skripsiku*
- ❖ *Sahabat - Sahabatku Angkatan 2009*
- ❖ *Almamaterku*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PRAKATA

Alhamdulillahirrobbil A'lamin segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang."

Penulis menyakini bahwa skripsi ini belum tentu dapat diselesaikan tanpa masukan, bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik

6. Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, memberikan do'a dan semangat serta dukungan baik moril maupun materil.
9. Saudara-saudaraku tercinta Febta, Sinta dan Rama yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Kepada pimpinan PT. SP2J, Karyawan – karyawan di Demang, Driver dan Pramugara Trans Musi yang udah membantu dalam menyusun skripsi ini
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin.

Palembang, Agustus 2013

Penulis

Anita Kusumawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	10
1. Retribusi Daerah.....	10
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	10
b. Jenis-jenis Retribusi	11
c. Prinsip dan sasaran Tarif.....	16

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi.	17
e. kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Trans Musi Pada PT. SP2J.....	17
f. upaya – upaya pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Trans Musi pada PT. SP2J.....	18
2. Pengawasan	19
a. Pengertian Pengawasan	19
b. Bentuk - bentuk pengawasan	20
c. Manfaat pengawasan	23
d. Tahap – tahap pengawasan.....	24
e. Prinsip – prinsip pengawasan.....	25
f. Pengertian pengawasan melekat.....	27
g. Pengawasan Melekat.....	28
3. Pengawasan Retribusi Pelayanan Trans Musi.....	29
a. Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi TransMusi	29
b. Prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data yang Diperlukan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah singkat PT.SP2J.....	36
2. Strukur Organisasi	38
a. Kedudukan dan fungsi pokok	38
b. Visi,Misi dan program PT. SP2J	39
c. Tujuan dan sasaran.....	40
d. Trayek.....	41
e. Standar Pelayanan Minimal	47
f. Sistem Tiket.....	48
g. Armada.....	48
h. Genaral Positioning System.....	49
i. Susunan Organisasi PT. SP2J.....	50
B. Pembahasan	
Pengawasan Penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi..	53
a. Menetapkan standar.....	55
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.....	56
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.....	56
d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis Penyimpangan	57
e. Pengambilan Tindakan Koreksi bila diperlukan	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data koridor di kota Palembang	5
Tabel I.2 Pendapatan Bus Rapid (BRT)	5
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.1 Data Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1	
 Bagan Struktur Organisasi	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Riser dari Lokasi Penelitian
Lampiran 2	Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi
Lampiran 3	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Sertifikat Hapalan Al- Quran
Lampiran 5	Sertifikat Toefl
Lampiran 6	Biodata Penulis

ABSTRAK

Anita Kusumawati/222009231/2013/analisis prosedur pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya/Akuntansi Sektor publik.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini Bagaimana prosedur pengawasan penerimaan retribusi yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan retribusi Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan dalam meningkatkan retribusi Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Manfaat penulisan adalah untuk penulis, untuk PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya, dan untuk almamater

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang beralamat di Komplek PTC Mall Blok G No. 48-49 Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi dengan indikator penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dan standar analisis penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya belum sesuai dengan prosedur karena tidak menetapkan standar untuk penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, akibatnya PT. SP2J tidak bisa mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada oknum – oknum yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga penerimaan retribusi Trans Musi kurang maksimal.

Kata Kunci : Retribusi Trans Musi, Retribusi PT. SP2J

ABSTRACT

Anita kusumawati/22 2009 231/2013/ The analysis of the monitoring procedures of Trans Musi service Retribution at PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya / Public Sector Accounting.

The problem of this study was how the monitoring procedures of retribution in order to increase the Trans Musi Retribution at PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya was. The objective of this study was to find out the monitoring of Trans Musi service retribution in order to increase the Trans Musi retribution at PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. The significances of this study were for the writer, PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya, and alma mater.

This study was conducted at PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya at PTC Mall complex Block G no.48-49 Palembang. It used descriptive study. The variable of this study was this study was the monitoring of Trans Musi service retribution with the indicators; standard-setting, the determination of activities measurement, activities measurement, the comparison of the implementation, and the standard of deviation analysis, the correction action taking if necessary. The data used in this study were primary and secondary data, techniques of collecting the data were using interview and documentation, data analysis user in this study was qualitative analysis.

The result showed that the monitoring of Trans Musi retribution at PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya had not been appropriately implemented because it did not determine the standard to measure activities-implementation. As a result, PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya could not measure the activities implementation, compare the implementation with the standard and the deviation analysis, and make the correction. In the practical implementation, there were people who did not follow the procedures, so the Trans Musi retribution was not maximal

Keywords : Trans Musi Retribution, Retribution of PT SP2J

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pemerintah kota Palembang pada bidang perhubungan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup tertib bagi masyarakat agar terwujud ketertiban yang diinginkan. Hal ini sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah pada setiap lapisan masyarakat, yang tentu tepat guna dan berhasil guna pada program pemerintah untuk mewujudkan rakyat yang tertib, teratur dan sumber daya manusia patuh sehingga tercipta generasi masyarakat yang produktif, bermutu tinggi dan berkompetensi. Menurut T. Hani (2009:5) dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan di kota Palembang telah berkembang berbagai masalah dan tantangan yang semakin berat dan kompleks yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi hambatan proses pelayanan secara aktif terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut, kementerian perhubungan telah melakukan penyesuaian, rencana strategi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebutkan sumber-

sumber daerah tersebut adalah : a) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah atau pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, b) Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Menurut Muqodim (2000 : 118), Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dari tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari PAD. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintahan daerah perlu melakukan upaya meningkatkan PAD, upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dari dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Retribusi daerah salah satunya yang berasal dari Trans Musi yang dikelola PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya oleh Trans Musi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serta bertanggungjawab. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi Trans Musi harus dipungut dan dikelola secara provisional dan bertanggungjawab karena

wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya yang akan diberikan kepada pemerintahan daerah.

Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam penggunaan penerimaan retribusi dan masyarakat tidak melakukan kecurangan dalam menggunakan karcis retribusi yang digunakan hanya untuk satu kali naik.

Saud Husna (2000 : 63) menyatakan pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi pertimbangan dan mengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan perlu dilakukan untuk membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar dapat diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pelaksanaan pengawasan dapat mengoreksi tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Trans Musi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya merupakan salah satu

retribusi jasa usaha daerah yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintahan daerah terutama kota Palembang.

Dinas Perhubungan dan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan retribusi koridor pada Trans Musi PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mengelola tata letak penempatan halte sedangkan berusaha meningkatkan pendapatan agar target yang diinginkan dapat tercapai. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya memastikan bahwa retribusi yang dipungut masuk ke kas Perusahaan sehingga segala bentuk penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan dapat dihilangkan.

Pelaksanaan pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilakukan oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Agar pengawasan menjadi efektif serta mengkomunikasikan seperti yang diharapkan, maka Trans Musi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya harus selalu menyesuaikan kebutuhannya yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing-masing individu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya harus turun ke lapangan (halte- halte transit) sehingga kemungkinan – kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi dalam Kotamadya Palembang Pasal 2 menyatakan dengan nama retribusi koridor dipunggut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan penataan kota Palembang.

Berikut ini dapat dilihat nama koridor Jalur Trans Musi

Tabel I.1
Data koridor di kota Palembang

No	Jalur Koridor	Harga
1	Albar – Ampera	Rp. 4.000,00
2	Sako – PIM	Rp. 4.000,00
3	Plaju – PS	Rp. 4.000,00
4	Kertapati – Jaka Baring	Rp. 4.000,00
5	Albar – Bandara	Rp. 7.000,00
6	Pusri – PS	Rp. 4.000,00
7	Kenten – Dempo	Rp. 4.000,00
8	Terminal Alang – Alang Lebar – Terminal Jaya	Rp. 4.000,00
9	Alang – Alang Lebar – Pangkalan Balai	Rp. 7.000,00
10	Terminal Karya Jaya – Indralaya	Rp. 7.000,00
11	Unsri Bukit – Unsri Indralaya	Rp. 7.000,00

Sumber : PT. SP2J, 2013

Tabel berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Retribusi Koridor PT. SP2J Tahun 2010 – 2012.

Tabel I.2
Pendapatan Bus Rapid (BRT)
Tahun 2010 – 2012

Tahun	Uraian	Tiket	Rupiah	Keterangan
2010	Pendapatan Bus Rapid Transit (BRT)	2.141.591 Lembar	Rp. 6,424.773.000	Soft lounching tanggal 22 februari
2011	Pendapatan Bus Rapid (BRT)	5.272.587 Lembar	Rp. 15.817.762.401	Kenaikan tiket dari Rp. 3000,- Menjadi Rp 4000,- pada tanggal 12 Desember
2012	Pendapatan Bus Rapid (BRT)	3.864758 Lembar	Rp 15.459.032.000.	Terjadi penyalagunaan tiket

Sumber : PT. SP2J, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan retribusi jasa pelayanan Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Tahun 2010 -2012 Terjadi penurunan Pendapatan. Pada tahun 2010 – 2011 pendapatan naik di karenakan bertambahnya armada Trans Musi dan koridor dan naiknya biaya retribusi dari Rp. 3000,- menjadi Rp. 4000,-. Pada tahun 2012 Pendapatan turun dikarenakan kurangnya pengawasan (Pengawas Lapangan). Menurut hasil wawancara penulis kepada bagian Tiketing Trans Musi Banyak faktor Penyebab turunnya pendapatan tersebut salah satunya yaitu penyalahgunaan tiket sebelum dilaporkan kepada Tiketing yang mungkin disebabkan oleh lemahnya prosedur pengawasan dan terjadi penyalahgunaan tiket yang dilakukan masyarakat, tiket yang hanya bisa digunakan satu kali naik.

Mengingat besarnya peranan dan Kontribusi retribusi khususnya retribusi pada transmusi dan diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi PT, Sarana Pembangunan Palembang Jaya maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Prosedur Pengawasan Penerimaan Retribusi Pelayanan Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimana prosedur pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).

D. Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan dan pengalaman penulis pada bidang yang diteliti. Sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka acuan yang dapat bermanfaat untuk dipergunakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Memberikan kontribusi, masukan dan bahan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang retribusi bagi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

3. Bagi Almamater

Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang studi yang sejenis dan dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dilakukan oleh Elis Sulistiawati (2006). Perumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu apakah prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketentuan Meteri Dalam Negeri No. 234 - 244 Tahun 2003, yang kedua yaitu apakah prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan ke beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketentuan Meteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003 dan untuk mengetahui kesesuaian pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003.

Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah pengelolaan prosedur retribusi pelayanan kesehatan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke bendaharawan khusus penerima di beberapa puskesmas masih ada yang tidak menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dan penyetoran hasil pungutan ada yang tidak setiap hari dan prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban yang kurang terkoordinasi. Selain itu target dan realisasi pada tiap puskesmas di kota Palembang tahun 2004 – 2005 ada yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan, ini disebabkan karena kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan. Tidak tercapai target yang ditetapkan pada puskesmas akan mempengaruhi pendapatan daerah. Ketetapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam anggaran pemerintah sangatlah penting untuk memastikan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sebab didalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak terdapatnya modal kerja tetapi yang ada hanyalah perencanaan kerja.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaannya yaitu sama – sama meneliti retribusi, sedangkan perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan prosedur pengelolaan retribusi pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang

sedangkan penelitian ini meneliti prosedur pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Variabel yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah pengelolaan prosedur retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan variabel penelitian ini adalah pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Indra (2003 : 90) retribusi daerah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Muqodim (2000: 3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Menurut Abdul Halim (2009: 86-94) macam – macam Retribusi Daerah adalah :

- a) Retribusi yang dikenakan pada jasa umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, pelayanan penitipan anak, penginapan, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengelolaan air limbah, penjualan usaha produksi daerah.
- c) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu seperti izin peruntuhan tanah, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, izin pengambilan hasil hutan.

Kesimpulan dari pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

b) **Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- (a) Retribusi pelayanan kesehatan
- (b) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan
- (c) Retribusi pelayanan biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP)
- (d) Retribusi pelayanan pasar
- (e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (f) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengukuran
- (g) Retribusi pelayanan air minum
- (h) Retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran
- (i) Retribusi pengujian kapal perikanan
- (j) Retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintahan daerah
- (k) Retribusi parkir tepi jalan umum

Jenis retribusi jasa umum sebagai mana dimaksudkan dalam ayat 2 ditetapkan peraturan pemerintah berdasarkan criteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang baik.

Objek jasa umum adalah pelayanan yang harus disediakan atau diberikan daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum yang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan jasa usaha adalah :

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- (c) Retribusi pelayanan tempat khusus parkir
- (d) Retribusi pelayanan terminal
- (e) Retribusi penginapan
- (f) Retribusi rumah potong hewan
- (g) Retribusi tempat pendaratan kapal
- (h) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (i) Retribusi penyeberangan diatas air
- (j) Retribusi pengolahan air limbah
- (k) Retribusi penjualan usaha produksi daerah
- (l) Retribusi tempat penyedotan kakus

(m) Retribusi tempat penitipan anak

Objek retribusi jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, dan subjek retribusi jasa usaha adalah orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau kadar yang dimaksud untuk membina, mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu.

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin proyek
- d) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- e) Retribusi izin gangguan
- f) Retribusi izin pengambilan hutan

Objek retribusi pelayanan tertentu adalah kegiatan pemerintahan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi atas pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintahan daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kesimpulan dari objek retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Daerah.

c.) Prinsip dan sasaran Penetapan Tarif

Peraturan Daerah Pasal 21 UU No 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa Umum Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
- b. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan layak
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Didasarkan pada tujuan untuk menutup bagian atau sama dengan biasa penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

d.) Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi

Faktor – faktor penyebab realisasi tidak sesuai dengan target yang biasanya terjadi pada setiap perusahaan atau instansi pada umumnya. Menurut Susilo dan Halim (2002 : 49) untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber – sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi PAD yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah bahwa belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada 4 (empat) faktor yaitu :

- a) Penentuan target yang belum realistis, dilihat dari :
 - 1. Penentuan target berdasarkan jumlah kendaraan umum
 - 2. Penentuan target berdasarkan anggaran
- b) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan dikarenakan :
 - 1. Belum efektifitas pemberlakuan sanksi
 - 2. Kenaikan tarif retribusi
- c) Kurangnya sarana dan prasarana operasional dilapangan
- d) Kurangnya pengawasan terhadap retribusi Trans Musi

e.) Kendala – kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Dalam hal penarikan pungutan retribusi Trans Musi banyak kendala – kendala yang dihadapi oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Menurut Susilo dan Halim (2002 : 51) kendala – kendala tersebut adalah :

a. Sanksi hukum yang kurang tegas

Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib retribusi kurang efektif, dikarenakan belum adanya perangkat hukum atau peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan sanksi secara tegas terhadap wajib retribusi yang membayar retribusi Trans Musi.

b. Sumber daya manusia

Sering terjadi kekeliruan dalam pemungutan retribusi, baik ketidaksengajaan maupun kesengajaan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi.

c. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan Prasarana dalam pemungutan retribusi, seperti pemungutan retribusi yang masih menggunakan cara manual

d. Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terutama wajib retribusi trans musu untuk membayar retribusi Trans Musi, seperti seringnya Pramugara Bus dan Halte Transit Kesulitan mana masyakat yang transit dan penumpang baru menghindari penerima retribusi karcis.

f.) Upaya –upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi di Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Menurut Susilo dan Halim (2002 :52) untuk meningkatkan penerimaan retribusi, Pemerintahan melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Merevisi Peraturan Daerah tentang retribusi yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Dalam merevisi Peraturan Daerah Pemerintah juga memuat saksi yang tegas agar penerimaan retribusi daerah dapat ditingkatkan.
- b. Penambahan petugas pemungutan retribusi (DISHUB) agar dapat mengarahkan bus atau kendaraan umum
- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sehingga petugas pemungutan retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat khususnya wajib retribusi, sehingga masyarakat sadar pentingnya retribusi untuk pembangunan Daerah.

2. Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut (Robert.2001:148) merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan, berhasil guna dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Revrisond Baswir (2001: 118) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Menurut Robert (2001: 159) adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang suatu sistem, baik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menentukan apakah terjadi pertimbangan dan mengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan menurut Heidjrachman dan Suad Husna (2000 : 118), pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat, dengan demikian pengawasan menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan yang fundamental.

Pengawasan penerimaan menurut Robert (2001: 163) adalah mengawasi pengelolaan mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai sumber sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas yang diwujudkan.

b. Bentuk – bentuk Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas kerja perlu dilakukan pengawasan baik intern maupun ekstern, guna menghindari pemborosan dan kesalahan – kesalahan lainnya.

Menurut Revrisond (2002: 248) menyatakan bahwa bentuk – bentuk pengawasan terdiri dari :

1) Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya, cakupan pengawasan ini meliputi hal – hal yang cukup baik, pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinnan kerja karyawan.

2) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, pengawasan ekstern ini dilakukan secara formal dan informasi, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat.

3) Pengawasan *financial*

Pengawasan *financial* adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lain-lain.

Berdasarkan waktunya pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*.

- a) Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dilaksanakan untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas – tugas pekerjaan.

- b) Pengawasan *repressif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan dengan cara membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Berdasarkan buktinya pengawasan dibagi menjadi pengawasan dari dekat dan pengawasan dari jauh.

- 1) Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan dari tempat terjadinya atau ditempat penyelenggaraan transaksi. Pengawasan dari dekat dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung terhadap administrasi termasuk penilaian administrasi sebagai bukti dan alat kelengkapan surat pertanggung jawaban yang dikirim.
- 2) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat pertanggungjawaban disertai bukti – bukti pendukung mengenai penerimaan – penerimaan dan pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.

Berdasarkan keabsahannya menurut (Revrisond.2002:234), pengawasan dibagi menjadi pengawasan/pemeriksaan kebenaran menurut hak dan pengawasan/pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran.

- a) Pengawasan menurut hak dilakukan terhadap transaksi - transaksi yang mengakibatkan pembayaran atau tagihan -tagihan kepada Negara dengan melakukan penelitian terhadap bukti – bukti pendukung.

b) Pengawasan/pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengeluaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengeluaran – pengeluaran yang dilaksanakan telah memenuhi prinsip – prinsip efektif dan efisien sehingga pengeluaran yang pemborosan dapat dihindari.

c) Manfaat Pengawasan

T.Hani Handoko (2000 : 366) menyatakan bahwa faktor – faktor pentingnya pengawasan dilakukan antara lain adalah :

1) Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintahan dan sebagainya.

2) Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati – hati.

3) Kesalahan – kesalahan, bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan – kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan – kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4) Kebutuhan manajer untuk mendelagasikan wewenang,

Bila manajer mendelegasi wewenang kepada bawahannya, tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu – satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas – tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

d) Tahap – tahap Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2000 : 362) menyatakan untuk melakukan proses pengawasan yang efektif biasanya melalui 5 tahap atau langkah sebagai berikut :

1) Penetapan standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil – hasil. Penetapan standar adalah kesepakatan – kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi – spesifikasi teknik sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi – definisi tertentu yang menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, maka dilakukanlah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan berbagai proses yang berulang – ulang dan terus menerus.

4) Perbandingan pelaksanaan dan standar analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai macam bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

e) Prinsip – prinsip Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, perlu adanya prinsip – prinsip dasar pengawasan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001: 243) prinsip – prinsip dasar pengawasan adalah sebagai berikut :

1) Prinsip pencapaian tujuan

Prinsip pencapaian tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan dari perencanaan.

2) Prinsip efisiensi pengawasan

Prinsip efisiensi pengawasan adalah bagaimana dapat menghindari penyimpangan – penyimpangan dari pada perencanaan, sehingga tidak timbul hal – hal diluar dugaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

3) Prinsip tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab adalah pengawasan hanya dapat terlaksana apabila manajer bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pengawasan.

4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang

Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang adalah pengawasan yang efektif harus ditunjukkan pada pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

5) Prinsip pengawasan langsung

Prinsip pengawasan langsung adalah teknik perencanaan yang paling efektif ialah mengusahakan manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer atas dasar suka berbuat salah. Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan adalah mengusahakan seoptimal mungkin para petugas yang memiliki kualitas yang baik.

6) Prinsip refleksi perencanaan

Prinsip refleksi perencanaan adalah perencanaan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan dari perencanaan sehingga tidak menyimpang dari pada tujuan yang telah ditetapkan.

7) Prinsip kebutuhan pengawasan

Prinsip kebutuhan pengawasan adalah pengawasan yang harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditunjukkan terhadap kebutuhan – kebutuhan informasi yang dibutuhkan berbeda dimana antara satu dengan yang lain tergantung pada tugas dan tingkat para manajer.

f) Pengertian Pengawasan Melekat

Menurut Revrisond Baswir (2000:126) pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah program kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Revrisond Baswir (2000: 133–134), sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintah dan bangunan, kebijakan, rencana dan perundang – undangan yang berlaku oleh atasan.

Sedangkan sasaran pengawasan melekat adalah :

- 1) Meningkatkan disiplin, prestasi kerja, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Menekankan hingga sekecil mungkin penyalagunaan wewenang.

- 3) Menekankan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara atau daerah dan segala bentuk pungutan liar.
- 4) Mempercepat perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- 5) Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan keteraturan perundang-undangan.

Menurut Revrisond Baswir (2000 : 135 – 136), prinsip – prinsip pengawasan melekat diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.93/Menpan/Tanggal 8 juni 1989 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan melekat harus dilakukan secara berjenjang, namun setiap pimpinan pada saat – saat tertentu dapat melakukan pengawasan melekat pada setiap jenjang yang ada dibawahnya.
- 2) Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasikan dan pelaksanaan.

g) Pengawasan Efektif

Ibrahim Lubis (2002: 160) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif meliputi :

- 1) Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya pengawasan harus menemukan fakta – fakta tentang bagaimana tugas – tugas dalam menjalankan organisasi.

- 2) Pengawasan harus bersifat *preventive*, artinya haruslah dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari ketetapan semula.
- 3) Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.
- 4) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- 5) Pengawasan hanya sekedar administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah pencapaian tujuan.
- 6) Pengawasan bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan kedepannya.

3. Pengawasan Retribusi Pelayanan Trans Musi

a) Prosedur pemungutan dan Penyetoran Retribusi Trans Musi

Berdasarkan peraturan daerah nomor 06 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan masyarakat mengenai pemungutan dan penyetoran daerah yaitu dengan menggunakan karcis, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketetapan yang mengaturnya.

Karcis disediakan oleh urusan peralatan dan pembekalan pada sub bagian tata usaha pelaksanaan teknik Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Unit pelaksana Teknik PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya membuat permohonan dengan mengisi formulir permintaan barang berharga guna mendapatkan persediaan karcis,

persediaan karcis ini disesuaikan dengan kebutuhan. Formulir permintaan tersebut dibuat dalam rangkap dua, setelah dicap setiap hari sesuai tanggal periode. Karcis diserahkan kepada pramugara setiap jam kerja dimulai setelah selesai jam kerja karcis dan penyeteran diserahkan kembali kepada ticketing masing – masing tempat Armada kembali (Halte terminal KM 12 dan terminal kertapati).

b.) Prosedur Pencatatan dan Pertanggungjawaban

Prosedur ini masih berhubungan dengan prosedur pemungutan dan penyeteran. Di dalam prosedur pencatatan dan pertanggungjawab ini dipegang oleh ticketing khusus penerima dan unit pelaksanaan teknik PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya, prosedur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bendahara ticketing penerima

Bendahara khusus penerima melakukan pencatatan berupa buku kas umum dalam rangkap 2 yang akan didistribusikan kepada :

- a) Lembar pertama untuk bendaharawan ticketing yang bersangkutan.
- b) Lembar kedua untuk pertanggungjawaban bendaharawan.

Buku kas umum dikerjakan sendiri oleh bendaharawan khusus penerimaan atas semua penerimaan dan penyeteran kekas Trans Musi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003 : 5-16) jenis penelitian menurut tingkat eksplorasinya terdiri dari :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independent*). Tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variable yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan pada penelitian ini variabelnya masih sama dengan penelitian mandiri tapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Penelitian ini mempunyai dua tingkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibuat suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengambil suatu gejala.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisis prosedur pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi Pada PT. Sarana Pembangunan Jaya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang beralamat di komplek PTC Mall Blok G no. 48-49 Palembang

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dibuat operasional variable, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator
Pengawasan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi	Segala kegiatan yang menjamin agar pengumpulan penerimaan retribusi pelayanan Trans Musi tidak menyimpang dari rencana yang sudah digariskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar 2. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 4. Perbandingan pelaksanaan dan standar analisa penyimpangan 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Sumber : Penulis, 2013

D. Data yang di perlukan

Menurut Nur Indiartoro dan Bambang Supomo (2002 : 146) dilihat dari cara memperolehnya data terdiri dari :

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain).

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini data primer digunakan diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan melalui serangkaian pertanyaan secara lisan (wawancara) yang berupa data mengenai pendapatan, penerimaan retribusi Trans Musi, dan Prosedurnya. Data sekunder berupa dokumen seperti peraturan daerah tentang retribusi pelayanan Trans Musi, Data tarif pelayanan Trans Musi dan sejarah singkat serta struktur organisasi PT. SP2J, visi misi serta dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dan W. Gulo (2002: 122-124) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada objek yang diteliti atau perantara yang mengetahui objek yang diteliti.

2. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara menggambarkan sebagian atau seluruh data yang telah ada penelitian sebelumnya.

4) Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sample

5) Kuisisioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.

Teknik pengumpulan data yang disusun dalam penelitian ini adalah dengan cara Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang atau dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, antara lain yaitu Pihak SP2J, pengawas lapangan, dan teknik dokumentasi yaitu berupa data sejarah dan struktur organisasi dan pembagian tugas dan pengelolaan retribusi pelayanan Trans Musi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2003 : 32) analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka – angka dan dapat dihitung.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis prosedur pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Awalnya Trans Musi Beroperasi pada Januari 2010 melalui penyerahan Bus Trans Musi dari Departemen Perhubungan sebanyak 15 unit. Saat itu Trans Musi hanya melayani dua koridor, yaitu Koridor 1 dan koridor 2. Hingga 2012 armada Trans Musi Telah mencapai 120 unit. Trans Musi ini awalnya beroperasi di Palembang, namun sekarang ia beroperasi sampai ke Indralaya juga. Namun ada 2 jenis Trans Musi yang beroperasi ke sana, yaitu TM (Trans Musi) khusus mahasiswa (Unsri Bukit – Unsri Indralaya) dan untuk umum (Terminal Karya Jaya – Indralaya).

Trans Musi adalah kendaraan berjenis Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palembang, Indonesia. Trans Musi dikelola oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palembang. Sistem transportasi Trans Musi ini menghubungkan moda transportasi lainnya berupa bandara, stasiun kereta api, terminal bus, dan terminal bus air.

Sistem pembayaran Trans Musi menggunakan Kartu pintar (smart card). Terdapat dua jenis smart card yaitu tiket sekali jalan (single trip) atau isi ulang. Smart card isi ulang dibuat dengan empat tipe yang bisa

dipilih masyarakat. Adapun voucher perdana untuk tipe isi ulang disediakan sebesar Rp. 18.000, dengan rincian Rp. 10.000 untuk voucher dan pulsa Rp. 8.000. Untuk voucher isi ulang juga disiapkan pls dari RP. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000.

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT. SP2J) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Kota Palembang yang didirikan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya ;
2. Peraturan Walikota Palembang No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2006 ;
3. Akte Notaris Siti Hikmah Nuraeni No. 1 Tanggal 4 September 2006.

PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Berdasarkan surat Walikota Palembang tanggal 22 Oktober 2009 No.555-2/002394/Dishup ditunjuk untuk pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi Palembang baik pengadaan APBN tahun 2009 maupun bantuan Kementerian Perhubungan, dibawah Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Palembang (UPTD Angkutan Massal).

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan dan Fungsi Pokok

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah perangkat kegiatan yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah di bidang Perhubungan. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dipimpin oleh seorang kepala RUPS di atas dan bertanggungjawab Dewan Komisaris.

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya bertugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- 2) Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Melaksanakan tugas – tugas tertentu yang ditugaskan oleh RUPS.

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan teknik di bidang Perhubungan sifatnya mendukung secara operasional Kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan urusan ketata usaha koridor.
- 4) Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknik Pelatihan.

- 5) Pelaksanaan pembiayaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS.
- 6) Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada RUPS tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (bagian- bagian bidangnya).
- 7) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Dishub dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

b. Visi, Misi dan Program PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya ditetapkan visi, misi dan program PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Visi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah Angkutan umum adalah andalan masyarakat tahun 2016.

Misi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah

1. Membangun system angkutan umum dalam Kota Palembang yang cepat, teratur, nyaman, aman, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Membangun jaringan transportasi yang terpadu dengan moda transportasi lain, yang dapat menghubungkan seluruh wilayah perkotaan serta menghubungkan simpul – simpul transportasi bagi pusat kegiatan bisnis dan kegiatan pariwisata di Kota Palembang.

3. Membangun armada angkutan umum yang bersih lingkungan.
4. Membangun system pengelolaan usaha angkutan umum yang profesional :
efisien, efektif, dan mandiri.

Program Kerja

Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mendorong dilakukan perubahan penyelenggaraan transportasi umum di perkotaan dari sistem ‘paratransit’ berskala kecil, menjadi sistem transit berskala menengah dan besar.

Undang – undang tersebut mengisyaratkan, agar semua kota besar, dengan penduduk di atas 0,5 juta jiwa, mengembangkan sistem transportasi massal yang beroperasi di jalur khusus, dengan kapasitas muat bus yang tinggi (pasal 139, 158), dimana penumpang hanya boleh naik/turun bus di halte yang ditentukan (pasal 143c), dan operator yang menangani tidak boleh perorangan, melainkan berbentuk perusahaan (pasal 139,174). Berdasarkan perintah dari undang – undang, Unit BRT Trans Musi merencanakan program jangka pendek/menengah dan jangka panjang.

c. Tujuan Sasaran PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

1. Tujuan

- a. Mewujudkan pemerataan pelayanan Trans Musi yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.

- b. Mengupayakan, merencanakan dan memfasilitaskan pengadaan dan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang keselamatan perhubungan di Kota Palembang.
- c. Tujuan dikembangkan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi yang baik kepada masyarakat dengan menciptakan suatu sistem angkutan umum yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, lancar, serta dapat diandalkan.

2. Sasaran

Sasaran yaitu terciptanya pelayanan Trans Musi yang aman, lancar, selamat, dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan asetabilitas orang, barang serta informasi kesegala pelosok Kota Palembang.

d. Trayek

Koridor Reguler

- Koridor 1 : Bawah Jembatan AMPERA - Terminal Alang Alang Lebar (KM 12)

Halte yang dilalui : Terminal Alang Alang Lebar, Simpang Kades A, Simpang Kades B, Sembaja A, Sembaja B, Griya Bahagia A, Griya Bahagia B, Asrama Haji (Transit K1/K5), Kampus IGM (Transit K1/K5),

DOLOG Simpang Tanjung Api-Api A, Dolog Simpang Tanjung Api-Api B, Kebun Bunga A, Kebun Bunga B, Perindustrian, Pool Damri, Simpang Indomie A, Simpang Indomie B, Akper Adyah, Telkom Talang Buruk, Simpang Talang Buruk, Seimia Charitas, Punt Kayu, Sukabangun B, Kantor Kehutanan Prov. Sumsel, RS Ernaldi Bahar A, RS Ernaldi B, JPO KM 5 A, JPO KM 5 B, JPO SMP Muhammadiyah 10 A, JPO SMP Muhammadiyah 10 B, Gloria/Simpang Polda (Transit K1/K2/K4), PDAM/Simpang Polda (Transit K1/K2/K4), SMA Negeri 3 A, SMA Negeri 3 B, RSUP Muhammad Hoesin A, RSUP Muhammad Hoesin B, Kodam Sriwijaya, SD Baptis, BNI 46/KONI Prov. Sumsel, RS Charitas A, RS Charitas B, Hotel Jayakarta Daira, JPO BNI Syariah (Transit K1/K6), Pasar Cinde, JPO Marathon/International Plaza (IP) A, JPO Marathon/International Plaza (IP) B, JPO Pusri A, JPO Pusri B, Masjid Agung (Transit K1/K3/K6/K7), Monpera (Transit K1/K3), Bawah Jembatan AMPERA.

- Koridor 2 (Bus yang dipakai K2 dan K4): Sako (Terminal Perumnas/Sako Kenten) - PIM (Palembang Indah Mall)

Halte yang dilalui : Terminal Sako, Simpang Bombat, Simpang Sapta Marga, RSAB Azzahra, Grand Garden A, Grand Garden B, Simpang Celentang A, Simpang Celentang B, SMA Kusuma Bangsa (SMA Kumbang) A, SMA Kusuma Bangsa (SMA Kumbang) B, Komplek Kedamaian, SMA Tunas Bangsa (Transit K2/K4/K7), JM Kenten (Transit

K2/K4/K7), Raja Studio/Simpang Patal, Palembang Trade Center (PTC) A, Palembang Trade Center (PTC) B, R. Sukanto, Kantor Bea Cukai A, BLPT A, BLPT B, Simpang SMP Negeri 9, Sersan Sani, Palcomtech, RS Hermina, Rimba Kemuning A, Rimba Kemuning B, Gloria/Simpang Polda (Transit K1/K2/K4), PDAM/Simpang Polda (Transit K1/K2/K4), Taman Polda, SMA Karya Sejati, SMK Negeri 2, RS Siti Khadijah A, RS Siti Khadijah B, Griya Agung/RM Sederhana, Capil (Catatan Sipil), Kancil Putih, Kios/SPBU A, Kios/SPBU B, Parameswara A, Parameswara B, Simpang SMA Negeri 10 A, Simpang SMA Negeri 10 B, Pasca Sarjana B, SMK Negeri 3, UNSRI A, UNSRI B, Padang Selasa, Kemang Manis A, Kemang Manis B, Tri Dharma A, Tri Dharma B, Pasar Gubah A (Transit K2/K3/K4), Pasar Gubah B (Transit K2/K3/K4), RM Ampera, SD Xaverius, PIM.

- Koridor 3 : Plaju - PS Mall (Palembang Square Mall)

Halte yang dilalui : Komperta Pertamina, Kantor Camat Plaju, Kantor Pos, Terminal Plaju, Lr. Abadi, SD Negeri 161, Civo A, Civo B, Sentosa, Bagus Kuning B, Patra Jaya A, Patra Jaya B, Pertahanan, JM Plaju A, JM Plaju B, Simpang Tiga Tangga Takat A, Simpang Tiga Tangga Takat B, SPBU Koko A, SPBU Koko B, Pertamina Pemasaran A, Pertamina Pemasaran B, STIE Akubank A, STIE Akubank B, Universitas Muhammadiyah, Universitas PGRI, Auto 2000, Universitas Bina Darma, DPRD A (Transit K2/K3), DPRD B (Transit K2/K3), Universitas Kader

Bangsa (UKB) A, Universitas Kader Bangsa (UKB) B, Pangkalan AMPERA, Monpera (Transit K1/K3), Masjid Agung (Transit K1/K3/K6/K7), PBK, Bappeda, Rumah Bari (Kantor Walikota/Pemkot), Benteng Kuto Besak (BKB), Jembatan Karang (Simpang Tangga Buntung/Pasar 26 Ilir) A, Jembatan Karang (Simpang Tangga Buntung/Pasar 26 Ilir) B, Puskesmas Merdeka, Bakorluh A, Bakorluh B, Kambang Iwak Park/Dirjen Pajak, SD Xaverius, RM Ampera, Pasar Gubah A (Transit K2/K3/K4), Pasar Gubah B (Transit K2/K3/K4), Simpang ISSES, Gajah Mada, PDPDE, Kantor Camat Bukit Kecil, PT POS, Bank Mandiri A, Bumi Sriwijaya, Hotel Arya Duta, TVRI, Hotel Horison, PS Mall.

- Koridor 4 (Bus yang dipakai K2): Jakabaring - Terminal Karya Jaya (Kertapati)

Halte yang dilalui: PLN, Simpang RS Bari, Pengadilan Agama, Dekrananda, Gelora Sriwijaya A, Bank Sumsel A, Bank Sumsel B, BKN A, BKN B, DPRD A (Transit K2/K3), DPRD B (Transit K2/K3), Universitas Kader Bangsa (UKB) A, Universitas Kader Bangsa (UKB) B, Pangkalan Ampera, Bunggaran A, Bunggaran B, Panca Usaha, Jambangan B, Mojopahit B, Simpang A. Wahab, Stasiun KA A, Stasiun KA B, Simpang Sungki/YWKA, Simpang Sungki/Lurah, Simpang Nila Kandi B, Terminal Karya Jaya.

- Koridor 5 : Terminal Alang Alang Lebar - Bandara SMB II

Halte yang dilalui : Terminal Alang Alang Lebar, Simpang Maskerebet A, Simpang Maskerebet B, Kampus IGM (Transit K1/K5), Asrama Haji (Transit K1/K5), Asrama Haji A, Asrama Haji B, Komplek PDK A, Komplek PDK B, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

- Koridor 6 : Pusri - PS Mall (Palembang Square Mall)

Halte yang dilalui : Simpang Celentang (Transit), Simpang Sekojo, Kalidoni, Mayor Zen, Yayasan, Gotong royong, Pasar Lemabang, Perintis Kemerdekaan, Bulog, Rajawali, Veteran, JPO BNI Syariah (Transit K1/K6), Pasar Cinde, JPO Pasar Cinde, JPO Marathon/International Plaza A, JPO Marathon/International Plaza (IP) B, JPO Pusri A, Masjid Agung (Transit K1/K3/K6/K7), JPO Pusri B, Kantor Gubernur, Jasa Rahaja, PS Mall.

- Koridor 7 : Kenten - Dempo

Halte yang dilalui : Kenten, MP Mangkunegara, JM Kenten (Transit K2/K4/K7), SMA Tunas Bangsa (Transit K2/K4/K7), Simpang Lapangan Golf, Puskesmas Bangau, Dempo Dalam, Let Kol Iskandar, JM Plaza, JPO Marathon/International Plaza (IP) A, JPO Marathon/International Plaza (IP) B, JPO Pusri A, JPO Pusri B, Masjid Agung (Transit K1/K3/K6/K7).

- Koridor 8 : Terminal Alang Alang Lebar (KM 12) - Terminal Karya Jaya (Kertapati)

Halte yang dilalui : Terminal Alang-Alang Lebar (KM 12), Maskerebet A, Maskerebet B, Macan Lindungan A, Macan Lindungan B, Seruni A, Seruni B, Poligon A, Poligon B, Terminal Karya Jaya (Kertapati).

Koridor Khusus

- Koridor Pangkalan Balai : Alang Alang Lebar - Pangkalan Balai

Halte yang dilalui : Terminal Alang Alang Lebar, Sukajadi, Serong, Tanah Mas, Air Batu, Mainan, Sembawa, Pulau Harapan, Desa Pangkalan Panji, Desa Kayu Ara Kuning, Gerbang Kantor Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Kabupaten Banyuasin, Kantor Urusan Agama Banyuasin, Suzuki Pangkalan Balai, RSUD Banyuasin.

- Koridor Indralaya : Terminal Karya Jaya - Indralaya

Halte yang dilalui : Terminal Karya Jaya, Simpang Pelabuhan Dalam, Fantasy Island, Agrowisata Bina Darma, Desa Palembang, Terminal Timbangan 32, Universitas Sriwijaya

- Koridor Indralaya : Unsri Bukit - Unsri Indralaya (Tidak beroperasi)

Titik keberangkatannya hanya ada 2 halte: Halte Unsri Bukit Besar (Dekat Pintu Gerbang) dan Halte Unsri Indralaya (Lapangan Depan

Perpustakaan). Pada saat sudah diperjalanan sebelum sampai ke UNSRI Indralaya, tidak melayani menaikkan dan menurunkan penumpang. Pembayaran hanya menggunakan smart card.

Perencanaan Koridor

- Koridor Khusus CBD (central business district)

Rencana perkembangan

1. Launching Koridor 7 (Kenten Laut - JM Letkol Iskandar)
2. Launching Koridor 8 (Terminal Alang-Alang Lebar - Terminal Karya Jaya)
3. Penambahan 30 Unit Bus
4. Penambahan Halte pada tempat-tempat yang strategis.

e . Standar Pelayanan Minimal

- Bus Beroperasi tiap hari Pk.06.00 – 21.00 Wib
- Jumlah Penumpang maksimum tiap Bus :
 - Bus Besar : duduk 33 orang berdiri 15 orang
 - Bus Sedang : duduk 23 orang berdiri 10 orang
- Kecepatan Bus : 20-40 km/jam
- Headway : 5 – 10 Menit
- Bus berhenti tiap halte: 0,5 – 1 menit

- Awak bus tidak makan didalam bus, tidak aktifkan handphone didalam bus
- Bebas asap rokok
- AC dalam Bus : 23 – 25 °C
- Audio System : maksimal level 4 dari 10 level
- Tarif Penumpang Rp. 4.000,- (dalam kota)
Rp. 7.000,- (luar kota)
- Tarif termasuk transit antar trayek

f. Sistem Tiket

Saat ini operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi masih menggunakan sistem tiket manual dan terus melakukan pembenahan Smart Card, dalam pengembangan selanjutnya sistem pembayaran Bus

Rapid Transit (BRT) Trans Musi akan menggunakan Smart Card. Dengan menggunakan sistem ini tidak akan terjadi transaksi uang antara penumpang dengan awak bus tetapi penumpang dapat melakukan isi ulang Smart Card yang mereka miliki pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

g. Armada

5 Armada bus yang dimiliki Transmusi:

- Mitsubishi Lux 135PS -- Rahayu Santosa
- Hyundai Mighty 136 B -- Restu Ibu
- Hyundai Koty-s 136PS Euro 2 -- Korindo
- Hino RK8-235 Nucleus 3 -- New Armada

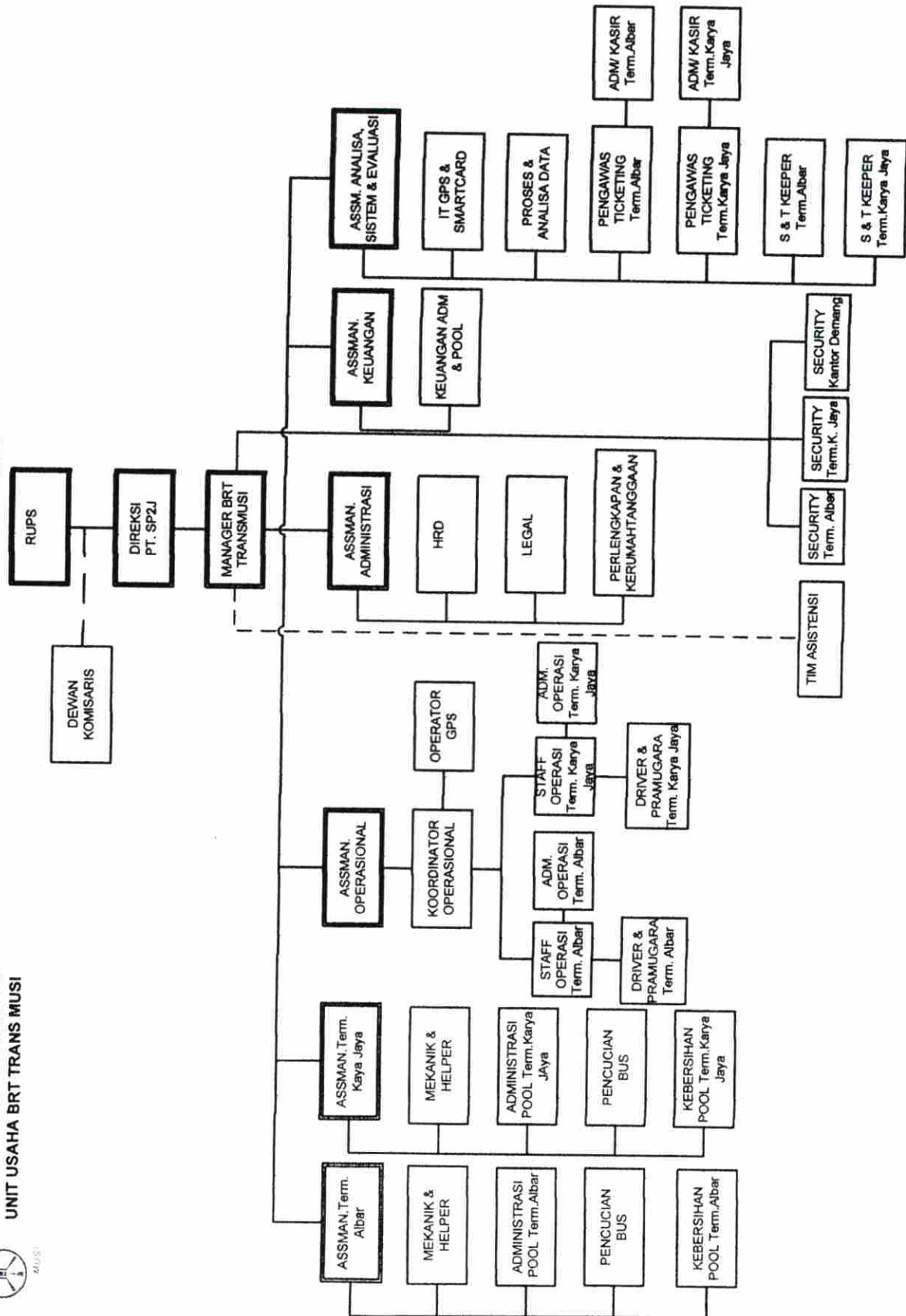
- Mercedes Benz OH-1521 – Laksana

h. General Positioning System (GPS) Tracking

- Mengetahui Posisi/ keberadaan Bus
- Dapat mengatur head way masing-masing bus
- Dapat mengatur jarak antar bus dan mengatur pada saat-saat mana saja diperlukan tambahan unit bus dan saat kapan unit bus harus dikurangi
- Menciptakan efisiensi karena pengaturan bus dapat dilakukan dari kantor pusat.



STRUKTUR ORGANISASI



Tabel IV.1

Data Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi

No	Komponen	Satuan	Total	Keterangan
1	Jumlah Bus Operasi	Unit	120	
2	Launching			
	a) Launching I	Unit	20	22 Februari 2010
		Unit	5	01 Mai 2010
	b) Launching II	Unit	60	23 Februari 2011
		Unit	35	21 Maret 2012
3	Kapasitas Bus			
	a) Bus Besar	Orang	45	
	b) Bus Kecil	Orang	33	
	Jumlah dan Ukuran Bus			
	a) Bus Besar Mercy	Unit	30	
	b) Bus Besar Hino	Unit	10	
	c) Bus Sedang Nyundai	Unit	40	
	d) Bus Sedang Mitshubishi	Unit	40	
4	Jumlah Bus Per Koridor			
	a) Koridor 1	Unit	26	
	b) Koridor 2	Unit	25	
	c) Koridor 3	Unit	20	
	d) Koridor 4	Unit	12	
	e) Koridor 5	Unit	5	
	f) Koridor 6	Unit	10	
	g) Aglomerasi	Unit	2	
	h) Aglomerasi	Unit	5	
	i) Angkutan Khusus	Unit	15	
5	Round Trip/hari	Putaran	6	
6	Head Way	Menit	5 – 10	
7	Load Faktor rata – rata	%	75	
8	Tingkat Efisiensi BBM			
	a) Bus Besar Mercy	Km/liter	3.8	
	b) Bus Besar Hino	Km/liter	2.6	

	c) Bus Sedang	Km/liter	2.8 – 3.0	
9	Kinerja Operasional Bus	%	85	
10	Panjang Round Trip			
	a) Koridor 1	Km	28	Alang – Alang Lebar – Ampera
	b) Koridor 2	Km	35	Sako – PIM
	c) Koridor 3	Km	38	Plaju – PS Mall
	d) Koridor 4	Km	29	Glora Sriwijaya – Karya Jaya
	e) Koridor 5	Km	14	Bandara – Alang – Alang Lebar
	f) Koridor 6	Km	22	Pusri – PS Mall
	g) Aglomerasi	Km	50	Karya Jaya – Indralaya (OI)
	h) Aglomerasi	Km	90	Alang – Alang Lebar – Pangkalan balai (Banyuasin)
	i) Angkutan Khusus	Km	70	Unsri – Indralaya
11	Jumlah Halte	Unit		
12	Jarak Halte	Meter		
13	Jam Operasional	WIB		
14	Jumlah Pramugara	Orang		
15	Jumlah Pengemudi	Orang		
16	Harga Tiket Dalam Kota			
	a) Dalam Kota	Rupiah	4.000	Pertanggal 12 Desember 2011
	b) Aglomerasi	Rupiah	7000	

Sumber : PT. SP2J, 2013

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengawasan Penerimaan Retribusi Trans Musi yang dilaksanakan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Pengawasan merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyelesaikan kembali yang telah dibuat, dengan demikian pengawasan menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan organisasi yang fundamental.

Pengawasan membantu menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didahului dengan melakukan perencanaan dengan tolak ukur untuk merancang pengawasan yang akan digunakan sebagai standar.

Dalam Pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi, pengawasan yang dilakukan oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang jaya adalah pengawasan tidak langsung atau control hasil yang dilakukan dari luar

bukan secara langsung, tetapi melalui laporan – laporan tulisan dan lisan. Untuk menjadi efektif dan untuk mengkomunikasi yang diharapkan, maka PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya harus selalu menyesuaikan kebutuhan yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing – masing individu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya harus turun kelapangan (halte – halte transit), walaupun terdapat batasan – batasan yang harus diperhatikan dalam pengawasan.

Prosedur pemungutan dan retribusi Trans Musi dimulai dengan mengadakan karcis oleh Unit Pelaksanaan Teknis PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Unit Pelaksana Teknis PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya ini kemudian membagikan karcis tersebut kepada wajib bayar dan hasil pemungutan disetor kepada ticketing khusus penerima periode dalam penyeteroran.

Kurangnya pengawasan terhadap prosedur pengawasan pemungutan dan penyeteroran retribusi, maka dapat teridentifikasi sebab – sebab terjadinya ketidak sesuaian tersebut untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Nampaknya yang menjadi permasalahan adalah saat jam - jam ramai di halte transit dan waktu penyeteroran.

Perihal mengenai tidak diadakannya pemakaian karcis sebagai bahan bukti pembayaran, ini jelas bisa dianggap sebagai hal yang menjurus pada kemungkinan terjadinya penyelewengan. Biasanya guna penyeteroran, petugas

pemungut cukup melihat ada karcis atau tidak penumpang, akan tetapi tidak melihat tanggal berlakunya karcis. Hal ini memang resiko atau kelemahan yang ada pada sistem penggunaan karcis. Petugas Karcis (Pramugara) tinggal menyesuaikan beberapa karcis yang ingin disetor dan kemudian melaporkannya keticketing. Laporan yang diberikan kepada ticketing sering kali juga tidak sesuai dengan yang dilaporkan misalnya karcis keluar sekian banyak tetapi penyetorannya kurang. Kelemahan ini sulit diatasi namun dapat diatasi dengan jalan mengadakan pengawasan secara langsung ke lokasi, dengan menyetor setiap hari dan lebih memperhatikan lagi penumpang yang turun naik di halte transit atau halte dimana pun.

Untuk menganalisa pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya penulis menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut :

a. Menetapkan Standar

Untuk melakukan pengawasan yang maksimal terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya, maka perlu menetapkan standar sebagai acuan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan cara menentukan anggaran. Akan tetapi pada Trans Musi belum menentukan standar / target untuk pendapatan tahun berikutnya, melainkan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Bus Trans Musi melakukan pengawasan hanya dengan membandingkan realisasi pendapatan tahun sekarang dengan tahun yang lalu.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Langkah selanjutnya dalam pengawasan retribusi Trans Musi adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh karyawan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah pengawasan langsung dilakukan dengan laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan lisan seperti pramugara mengontrol kembali karcis dan smart care penumpang, pramugara, driver dan pengawas lebih mengawasi lagi penumpang yang naik turun di halte transit, mengawasi kegiatan di dalam Bus melalui cctv, melakukan sosialisasi atau penyuluhan ketertiban lalu lintas. Sedangkan laporan tertulis berasal dari ticketing berupa laporan keuangan.

c. Pengukuran pelaksanaan Kegiatan

Tindakan selanjutnya dalam pengawasan retribusi Trans Musi adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dalam melakukan pengawasan dilakukan secara langsung, tetapi melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan ketertiban lalu lintas sehingga terkendalinya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Contohnya tidak melanggar

ketertiban lalu lintas, Bus tidak saling kejar mengajar kecepatan maksimal, kenyamanan dan keamanan prioritas utama Trans Musi

Salah satu kegiatan yang dilakukan PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya untuk mengatasinya dengan cara melakukan razia dadakan disetiap Bus –Bus Trans musu terhadap penumpang atau Pengecekan kembali Karcis oleh Karyawan Khusus yang diturunkan oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Trans Musi (Pramugara), mengawasi kegiatan di dalam Bus Trans Musi melalui cctv yang dipasang di dalam bus untuk mengontrol semua kegiatan dan menghindari terjadinya kejahatan didalam Bus, memberi sanksi atau teguran kepada karyawan yang tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan atau kurangnya pengawasan yang dilakukan karyawan (Pramugara) terhadap pelayanan kepada masyarakat.

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tidak memiliki standar untuk menentukan target pendapatan setiap tahunnya, melainkan membandingkan realisasi pendapatan tahun sekarang dengan tahun yang lalu.

Dengan demikian PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tidak dapat melakukan analisis penyimpangan yang terjadi antara standar/target. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya melakukan pengawasan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi Trans Musi selama tahun 2010 – 2012, karena PT. SP2J tidak memiliki standar target setiap tahun untuk membandingkan realisasi pendapatan maka hanya bisa dilihat dari pendapatan setiap tahunnya. Dimana persentase penerimaan retribusi Trans Musi untuk

tahun 2010 adalah sebesar Rp. 6.424.773.000, kemudian naik menjadi Rp. 15.817.762.401 pada tahun 2011, sedangkan penerimaan retribusi Trans Musi untuk tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 15.459.032.000, penurunan penerimaan pendapatan tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain, banyaknya penyalagunaan karcis dan smart card, Kurangnya pengawasan atau pramugara yang masih lengah dalam mengawasi karcis dan smart card, serta kurangnya pengawasan di tempat atau halte – halte transit terutama saat jam jam tertentu (saat halte ramai) banyaknya penumpang yang berdesakan yang mengakibatkan pramugara kesulitan mana yang sudah memiliki tiket dan tapping smart card, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pencapaian pendapatan dan pada tahun 2011 dengan pendapat Rp. 15.817.762.401 dan selanjutnya pada tahun 2012 penerimaan Trans Musi mengalami penurunan menjadi Rp.15.459.032.000.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tidak dapat melakukan tindakan koreksi yang diperlukan karena tidak adanya analisis penyimpangan antara standar/target dengan realisasi.

PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya hanya dapat melakukan tindakan koreksi dengan cara membandingkan penerimaan dari tahun sekarang dengan tahun lalu, pengawasan yang dilakukan belum maksimal karena pendapatan penerimaan retribusi Trans Musi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi penurunan. Untuk memaksimalkan penerimaan

retribusi Trans Musi, sebaiknya PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya memperketat pengawasan, melakukan koreksi serta memberikan tindakan tegas dan sanksi kepada pramugara Trans Musi yang melakukan penyelewengan, melakukan koordinasi bidang – bidang yang terkait dalam Trans Musi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya mengenai pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya melalui 5 indikator yaitu : penetapan standar, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan, koreksi bila diperlukan, maka di ketehui PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya belum melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan pada pelaksanaannya dilapangan masih ada oknum – oknum yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan sehingga penerimaan retribusi Trans Musi pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya kurang maksimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahasan Pengawasan Penerimaan Pelayanan Trans Musi Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan yang dapat diambil untuk meningkatkan kontribusi retribusi Trans Musi terhadap Retribusi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

A. Simpulan

Pengawasan penerimaan retribusi Trans Musi yang dilaksanakan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya belum sesuai dengan prosedur karena tidak menetapkan standar untuk mengawasi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, akibatnya PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tidak bisa pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, maka dapat diketahui PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya belum melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada oknum – oknum yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga penerimaan retribusi Trans Musi kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya guna menentukan kebijakan – kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kontribusi retribusi Trans Musi terhadap Retribusi PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah hendaknya PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

1. Menentukan standar/target untuk tahun berikutnya agar dapat menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar/target realisasi dengan demikian PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dapat menganalisis penyimpangan yang terjadi dan bisa mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
2. Terus meningkatkan penerimaan retribusi Trans Musi dan memberi sanksi yang tegas kepada oknum – oknum yang melakukan penyelewengan baik itu kepada petugas pendataan maupun pemungut retribusi.
3. Diharapkan juga PT. Sarana pembangunan Palembang jaya dapat meningkatkan sumber daya yang ada agar lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Dan dengan adanya sumber – sumber potensi baru maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi PT. Sarana Pembangunan Palembang jaya.

DAFTAR PUSTAKA.

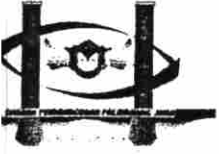
- Abdul Halim.2002.**Manajemen Keuangan Publik**,Universitas Gajah Madah.
- Hasibuan.Malayu S.P.2001.**Prinsip Dasar Manajemen**,Penerbit Erlangga,Jakarta.
- Heidjrachan Ranupradja dan Saud Husnan.2000.**Manajemen Personalialia**.Edisi keempat.Penerbit BPFE.Yogyakarta.
- Ibrahim Lubis.1995.**Fungsi Dasar Manajemen**,Penerbit Ganesha,Jakarta
- Indra Bastian.2003.**Sistem Akuntansi Sektor Publik Salemba Empat**. Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia**.2002,Penerbit M2S,Bandung.
- Muqodim.2000.**Perpajakan**,Edisi kedua VII press dan ekonisia.
- Nan Lin alih bahasa w.gulo.2002.**Metode Penelitian Bisnis**,Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo.2002.**Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edis Pertama. BPFE.Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998.**Tentang Retribusi dalam kota Madya Palembang**.
- Revrisond Baswir.2000.**Akuntansi Pemerintahan Indonesia**.BPFE.Yogyakarta.
- Robert J.Mickler.2001.**Manajement**.Penerbit PT.Damar Mulia Putaka Jakarta.
- Saud Husna.2003.**Manajemen Pernebit Ganesa**. Jakarta
- Sugiyono,2003.**Metodologi Penelitian Bisnis**.CV.Alfabeta.Bandung.
- Supomo.2002.**Metodologi Penelitian Bisnis**.BPFE.Yogyakarta.
- T.Hani Handiko.2000.**Manajemen dan Aplikasinya**,Penerbit Ganesha.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Retribusi dan penggunaan dana

Skripsi :

Elis Sulistiawati.2006.Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengawasan Retribusi Pelayanan Kesehatan.Skripsi.FE-UMP. (Tidak dipublikasikan)



PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA
UNIT USAHA BRT TRANS MUSI

KANTOR : JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. 507 A
TELP. (0711) 443865 FAX. (0711) 443863 PALEMBANG



TRANS MUSI

SURAT KETERANGAN

144/BRT/S-HR/VIII/2013

Unit Usaha Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan ini menerangkan:

Nama : **Anita Kusumawati**
N P M : **22 2009 231**
Jurusan/Universitas : **Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhamadiyah Palembang**
Alamat : **Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian untuk Skripsi pada Unit Usaha Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu **15 Februari - 15 Mei 2013** dan selama melakukan Penelitian yang bersangkutan telah melaksanakannya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Agustus 2013

Aries Rachmansyah

Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3619/D/T/K-II/2010
 : No. 3620/D/T/K-II/2010
 : No. 7094/D/T/K-II/2011

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)
 No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2013
 Waktu : 13.00 s/d 18.00 WIB
 Nama : Anita Kusumawati
 NIM : 222009231
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN TRANS MUSI PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Pembimbing	7-9-2013	
2	Sunardi, Drs. S.E., M.Si	Ketua Penguji	14-9-2013	
3	Betri, S.E., M.Si., Ak	Penguji I	13-9-2013	
4	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji II	7-9-2013	

Palembang, September 2013

An. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosafina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021961



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Anita Kusumawati	PEMBIMBING
NIM : 22 2009 231	KETUA : Lis Djunlar, S.E, M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROSEDUR PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN TRANS MUSI PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	4 / 4 2013	Bab 1	<i>[Signature]</i>		Perbaik
2	24 / 4 2012	Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>		Perbaik
3	08 / 5 2012	Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>		Perbaik
4	08 / 5 2013	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaik
5	15 / 5 2013	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaik
6	31 / 5 2013	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaik
7	5 / 6 2013	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaik
8	12 / 6 2013	Bab I, II, III, IV, V	<i>[Signature]</i>		Perbaik
9	19 / 6 2013	Kompre 1 s/d V	<i>[Signature]</i>		Acc.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal

a.n. (Debet)

Ketua Jurusan

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si





FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

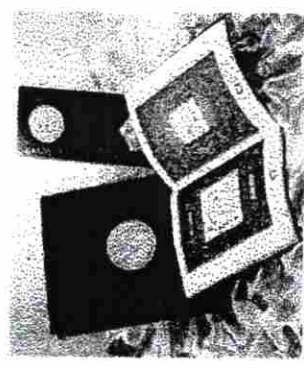


102/J-10/FE-UMP/SHA/IV/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ANITA KUSUMAWATI
NIM : 222009231
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 03 April 2013

an. Dekan



Nekil Dekan IV



Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433

e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME ANITA KUSUMAWATI
TIME TAKEN 08.00-10.00 AM

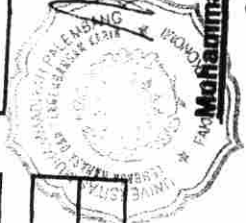
SEX M/F
DATE OF BIRTH 20-May-1989
TEST DATE 20-Mar-2013

EXAMINEE'S NUMBER 1516

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
42	38	40	400

DATE OF REPORT
20/03/2013

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.
 Consultant



Mohammad Fahmi, S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

BIODATA PENULIS

Nama : ANITA KUSUMAWATI
Nim : 22 2009 231
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 20 Mei 1989
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. RW Mongisidi No. 04 RT. 09 Kalidoni
Nomor Telepon/HP : 08974409140
Nama Orang Tua :
 Bapak : Syamsul Bahri
 Ibu : Sumiyati
Pekerjaan Orang Tua :
 Bapak : Buruh
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl.RW Mongisidi No. 04 RT. 09 Kalidoni

Palembang, Agustus 2013

(Anita Kusumawati)